

**PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 11 TAHUN 2002**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI ,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Nota Kesepakatan Antara Gubernur Bali dengan Ketua DPRD Propinsi Bali Nomor 903/2389/BAPPEDA/Tahun 2002 tentang Arah dan Kebijakan 050/1661/DPRD/Tahun 2002 Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2003 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali Tahun Anggaran 2003, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasat 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) ;
18. Keputusan DPRD Propinsi Bali tanggal 4 Pebruari 2002 Nomor 06/KPTS/DPRD/2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Bali.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BALI**

MEMUTUSKAN !

rfenetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2003

Pasal1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2003 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	613.827.277.000,00
2. Belanja	Rp.	663.827.277.000,00
		<hr/>
Defisit	Rp.	<u>50.000.000-000,00</u>

3. Pembiayaan :

- a. Penerimaan Rp. 60.000.000.000,00
 - b. Pengeluaran Rp. 10.000.000.000,00
-

Selisih Rp. 50.000.000.000,00

Pasal2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah ;
- 4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah ;
- 5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah ;
- 6. Lampiran VI Daftar Aktiva Tetap Daerah ;
- 7. Lampiran VII Daftar Dana Cadangan ;
- 8. Lampiran VIII : Daftar Utang atau Pinjaman Daerah.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2002

GUBERNUR BALI

ttd

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2002

ttd

PUTU WIJANAYA,SH
PEMBINA UTAMA
NIP600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 NOMOR 60